

ABSTRAK

PELAKSANAAN HAK INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

Oleh:

Andi Natanael Marusaha

Pembentukan peraturan daerah hasil usulan inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2021 berjumlah enam raperda, salah satunya mengenai sistem drainase. Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung mengusulkan raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase karena kurangnya pengelolaan drainase di Bandar Lampung. Permasalahan banjir dan genangan yang sering terjadi di Bandar Lampung melatarbelakangi usulan raperda ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses berlangsungnya pelaksanaan pembentukan peraturan daerah hasil inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Teori yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Prospektif oleh Dunn dalam Edi Suharto (2020). Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian ini yakni proses pelaksanaan pembentukan peraturan daerah Penyelenggaraan Sistem Drainase melalui hak inisiatif anggota DPRD Kota Bandar Lampung terlaksana dengan baik walaupun ketika penelitian ini berlangsung, prosesnya belum selesai. Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan harapan walaupun belum dapat diimplementasikan karena belum diundangkan.

Kata kunci: drainase, dprd, peraturan daerah

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INITIATIVE RIGHTS OF MEMBERS OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE PROPOSED DESIGN OF A REGIONAL REGULATION FOR THE IMPLEMENTATION OF A DRAINAGE SYSTEM

By:

Andi Natanael Marusaha

The formation of regional regulations as a result of the initiative proposed by members of the Bandar Lampung City DPRD in 2021 amounts to six regional regulations, one of which concerns the drainage system. Commission III DPRD Bandar Lampung City proposed a draft regional regulation on the Implementation of the Drainage System due to the lack of drainage management in Bandar Lampung. The problem of flooding and inundation that often occurs in Bandar Lampung is the background of this proposed regional regulation. This study aims to see the ongoing process of implementing the formation of regional regulations as a result of the initiative of members of the DPRD Kota Bandar Lampung. The theory used is the Prospective Policy Analysis by Dunn in Edi Suharto (2020). Data collection techniques used in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. For the results of this study, the process of implementing the formation of regional regulations for the Implementation of the Drainage System through the initiative rights of members of the Bandar Lampung City DPRD was carried out well even though when this research took place, the process had not been completed. The policy recommendations issued are in line with expectations, although they cannot be implemented because they have not yet been promulgated.

Keywords: drainage, regional people's representative board, local regulation